

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG MASALAH**

Pasca Perang Dingin, keadaan sistem internasional mengalami perubahan. Sebelumnya, negara-negara lebih mengutamakan kekuatan militer dan kekuatan politik dalam berinteraksi dan mempertahankan posisinya dalam sistem internasional. Namun interaksi dalam sistem internasional mengalami pergeseran dengan munculnya isu perekonomian. Tanpa perekonomian yang baik, suatu negara akan kesulitan untuk memiliki pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil (Parkinson, 2015). Kini negara lebih mengedepankan kekuatan ekonomi dan cara-cara diplomasi saat berhubungan dengan negara lainnya dalam rangka mendapatkan keuntungan. Negara berkompetisi dengan satu sama lainnya untuk mendapatkan seperti, akses pasar, investasi, perdagangan bebas, bantuan luar negeri, dan lainnya sebagai cara yang lebih efektif untuk memperkuat keamanan nasional, memajukan politik luar negerinya, dan mempengaruhi negara lain (Saner & Yiu, *International Economic Diplomacy: Mutations in Post-modern Times*, 2003).

Perkembangan konsep ekonomi dan diplomasi dalam sistem internasional yang disebabkan oleh adanya globalisasi dan interdependensi antarnegara melahirkan apa yang disebut dengan diplomasi ekonomi (Bayne & Woolcock, *The New Economic Diplomacy*, 2017). Diplomasi ekonomi memiliki jangkauan yang lebih luas karena terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan dalam negeri dan dengan negara lain. Aktor yang terlibat didalam diplomasi ekonomi juga tidak hanya berfokus pada aktor negara atau perwakilan negara namun juga melibatkan aktor non-negara atau instrumen ekonomi nasional yang memiliki kepentingan dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi (NGOs, MNCs, sektor swasta, dan lainnya). Aktor-aktor non-negara ini turut memonitor isu-isu perekonomian yang sedang terjadi dan dapat memberikan pendapatnya. Sehingga aktor-aktor non negara tersebut dapat mempengaruhi bagaimana proses diplomasi hingga hasil akhir dari suatu diplomasi. Namun begitu, diplomasi ekonomi tidak terlepas dari tujuan dari kebijakan luar negeri suatu negara untuk mendapatkan keuntungan dalam hubungan internasional (Sabaruddin, 2017). Sehingga diplomasi ekonomi diperlukan sebagai upaya

negara untuk membuat keputusan di dalam negeri maupun luar negeri yang dapat menguntungkan di dalam bidang perekonomian.

Amerika Serikat (AS) sebagai salah satu negara yang memiliki kemampuan ekonomi yang kuat tentunya telah mengimplementasikan diplomasi ekonomi. *U.S Department of State* menempatkan ekonomi dan kekuatan pasar sebagai salah satu pusat kebijakan luar negeri AS. Dalam konteks AS, diplomasi ekonomi memiliki arti untuk memanfaatkan kekuatan ekonomi global sebagai upaya memajukan kebijakan luar negeri dan juga sebagai alat untuk menopang kekuatan ekonomi AS (U.S Department of State, 2017). AS telah melakukan berbagai cara yang tentunya efektif dalam melaksanakan diplomasi ekonomi dan mendorong pembangunan ekonominya. Hal-hal yang telah dilakukan dalam pelaksanaan diplomasi Ekonomi AS adalah seperti melakukan memberikan *Foreign Direct Investment* (FDI) melalui perusahaan-perusahaan multinasional, mendirikan lembaga multilateral yang memfasilitasi perdagangan global, serta memberlakukan sanksi ekonomi (Lorenz, 2015). AS memang telah lama menggunakan praktik-praktik ekonomi untuk meningkatkan akses pasar barang dan jasa. Namun dalam beberapa dekade terakhir, menggunakan instrumen ekonomi dan diplomasi secara sistematis dan strategis lebih diutamakan dalam praktik ekonomi AS. Hal tersebut dianggap lebih esensial untuk digunakan dalam kondisi dimana kompetisi ekonomi semakin sengit.

Salah satu bentuk penerapan diplomasi ekonomi adalah dalam perdagangan internasional. Perdagangan internasional bagi AS merupakan hal yang penting karena menyangkut hal-hal seperti mendorong akses pasar, pertumbuhan ekonomi, meningkatkan standar hidup, serta membantu warganya untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan dengan harga yang terjangkau. Dalam melakukan perdagangan internasional, AS sendiri merupakan negara yang terbuka dan kompetitif. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya perjanjian-perjanjian perdagangan yang AS telah lakukan baik dalam cakupan bilateral, multilateral, maupun regional. Sehingga menempatkan AS sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia dan merupakan negara pengekspor dan pengimpor barang dan jasa terbesar. Secara khusus dalam bidang agrikultural, nilai dagang produk agrikultural AS telah menyumbang total \$264 Miliar bagi perdagangan AS selama tahun 2017 dengan rincian total impor sebesar \$121 miliar dan total ekspor sebesar \$143 Miliar. Sehingga surplus perdagangan sektor agrikultural AS pada tahun 2017 sebesar \$22 Miliar (U.S. Trade Representatives, 2017). Hal ini memperlihatkan sektor agrikultural AS menjadi salah satu sektor yang menjanjikan bagi perekonomian AS.

Produk daging sapi merupakan salah satu dari banyak produk agrikultural unggulan AS. Memang daging sapi AS sempat mengalami penurunan ekspor pada tahun 2003- 2004 karena ditemukannya kasus *Bovine Spongiform Encephalopathy* (BSE) atau penyakit sapi gila pada sapi perah yang berasal dari Negara Bagian Washington. Penyakit tersebut dapat menular ke manusia apabila mengonsumsi produk sapi dari sapi yang terjangkit BSE (Brown, 2004). Hal ini tentu saja mempengaruhi akses pasar daging sapi AS secara internasional karena banyak negara yang menutup akses pasar mereka. Namun pada tahun 2006, pengiriman daging sapi AS kembali dapat dilakukan tetapi di bawah aturan yang ketat yaitu hanya daging sapi di bawah usia 20 bulan yang dapat diekspor. Ekspor daging sapi AS lalu kembali mengalami kenaikan dan pada tahun 2011 ditunjukkan dengan nilai net ekspor daging sapi AS menunjukkan angka positif (Widmar, 2020). Salah satu penunjang naiknya ekspor dari daging sapi AS sendiri adalah karena AS menjalankan beberapa program *campaign* seperti yang dilakukan di negara-negara Asia, yaitu '*We Care*' di Jepang dan '*To Trust*' di Korea Selatan (USMEF, 2012). Program-program tersebut dijalankan untuk membangun kembali kepercayaan konsumen terhadap daging sapi asal AS.

Kawasan Asia merupakan salah satu kawasan strategis bagi AS untuk melebarkan pengaruh ekonominya. Salah satu negara di Asia yang telah menjadi mitra AS adalah Jepang. Jepang merupakan mitra penting dalam beberapa bidang kebijakan luar negeri AS, terkhusus dalam hal keamanan dan perdagangan. Dalam bidang perdagangan, Jepang merupakan mitra dagang terbesar keempat AS dengan menjadi pasar ekspor terbesar barang dan jasa AS (Congressional Research Service, 2019). Menurut laporan oleh *Bureau of Economic Analysis* yang merupakan bagian dari *U.S Department of Commerce*, dapat dilihat bahwa di tahun 2020 ekspor barang dan jasa AS ke Jepang bernilai USD 102,4 miliar (4.8% dari total ekspor AS). Begitupula impor dari Jepang ke AS bernilai USD 150.8 miliar (5,4% dari total impor AS) (Bureau of Economic Analysis, 2020).

Jepang merupakan pasar utama bagi daging sapi AS. Jepang baru mulai melakukan impor daging sapi dari AS sejak tahun 1970an. Hal ini karena konsumsi daging sapi di Jepang secara historis dibatasi oleh adanya aturan keagamaan (Gorman, Mori, & Hwan Lin, 1990). Namun sejak tahun 1978 muncul tren konsumsi daging sapi di Jepang yang disebabkan oleh adanya perubahan pola makan masyarakat di Jepang. Keterbatasan wilayah di Jepang membuat Jepang tidak bisa memenuhi kebutuhan akan daging sapi sendiri. Sehingga Jepang mengekspor daging-daging sapi dari negara lain. Hal tersebut lalu mendorong terbentuknya perjanjian dagang mengenai impor daging sapi dari AS ke Jepang

pertama kali pada 1988. Perjanjian dagang tersebut ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian *Beef Market Access Agreement* untuk menghapus sistem kuota impor daging sapi dan menggantikannya dengan tarif (Wahl, William, & Hayes, 1989). Negosiasi yang terjadi pada perjanjian tersebut tentang impor daging sapi meredakan gesekan-gesekan dalam perdagangan antara kedua negara. Ukuran dan nilai impor daging sapi AS sejak tahun 1991, perdagangan daging sapi Jepang hanya dibatasi oleh hambatan sanitasi dan tarif *ad valorem*. Menurut data yang diperoleh melalui *beef2live* sejak 1989, AS telah mengekspor rata-rata 632 juta pon daging sapi setiap tahunnya ke Jepang. Pada saat itu AS berhasil menegosiasikan perdagangan komersial sepenuhnya, tanpa keterlibatan *Livestock Industry Promotion Corporation*<sup>1</sup> (LIPC), dan tanpa persyaratan kualitas tertentu pada daging sapi. Kini, AS mendominasi impor Jepang terkhusus pada potongan *short plate* dari daging sapi beku AS (USMEF, 2017). Hal tersebut karena potongan *short plate* daging sapi AS memiliki kualitas yang tinggi dan dapat menyediakan pilihan kelas dari potongan *short plate* dalam jumlah besar untuk digunakan dalam restoran-restoran di Jepang.

Pasca kejadian ditemukannya penyakit sapi gila, AS kehilangan akses pasarnya di Jepang. Sehingga untuk kembali meningkatkan akses pasarnya, AS melakukan berbagai upaya untuk kembali meraih akses pasarnya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh AS untuk masuk ke dalam pasar Jepang adalah dengan bergabung dengan *Trans-Pacific Partnership* (TPP). TPP merupakan perjanjian perdagangan bebas (FTA) antara 12 Negara Asia-Pasifik yaitu, Amerika Serikat, Australia, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Vietnam, Jepang, Chile, Mexico, Peru, Canada, dan New Zealand. TPP menjadi salah satu landasan kebijakan ekonomi AS di Asia Pasifik di bawah pemerintahan Obama (Scott, 2016). Melalui TPP, negara-negara anggotanya berupaya untuk meliberalisasikan perdagangan dan investasi dengan menetapkan aturan-aturan baru di kawasan Asia-Pasifik yang berbeda dengan aturan-aturan yang telah ada di *World Trade Organization* (WTO) (Fergusson, 2016). Namun pada awal tahun 2017, ketika pemilu kepresidenan AS dimenangkan oleh Donald Trump, Ia memiliki pandangan lain mengenai peran AS di Asia-Pasifik. Ia memutuskan untuk mundur dari TPP sehingga TPP tidak pernah berlaku. Alasan Trump mundur dari TPP adalah sebagai salah satu bentuk implementasi janji kampanyenya melalui kebijakan luar negeri Trump yaitu, "*America's First*". Menurut Trump, TPP mencuri

---

<sup>1</sup> LIPC merupakan suatu lembaga yang dimiliki pemerintah Jepang untuk melindungi industri daging sapi dalam negeri yang didirikan pada November 1961 dibawah perjanjian *Livestock Products Price Stabilization Act*.

lapangan pekerjaan warga AS yang secara bersamaan menguntungkan perusahaan-perusahaan besar sehingga merugikan bagi AS (Pham, 2016).

Ekspor daging sapi di AS menghadapi hambatan tarif sebesar 38,5% di Jepang. Hambatan tarif ini diberlakukan bagi semua negara yang melakukan ekspor daging sapi ke Jepang sesuai dengan ketentuan dibawah komitmen WTO. Namun, pada tahun 2019 volume dan nilai ekspor daging sapi AS mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan tarif daging sapi AS yang tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang berada dibawah perjanjian *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership* (CPTPP) yang merupakan perpanjangan tangan dari perjanjian TPP. Dibawah perjanjian CPTPP, negara anggotanya mendapatkan keuntungan berupa penurunan tarif impor daging sapi sejak diimplementasikan pada Desember 2018. Salah satu negara yang menerima penurunan tarif adalah Australia. Australia sendiri merupakan negara kompetitor utama AS di pasar Jepang. Oleh karena itu, daging sapi AS berada pada posisi yang tidak menguntungkan karena AS tidak memiliki kesepakatan dagang apapun dengan Jepang.

Selain hambatan ekspor berupa tarif, AS juga mendapatkan hambatan dagang berupa hambatan non-tarif. Hambatan ini dikenal sebagai mekanisme *special safeguard* dibawah ketentuan WTO. Mekanisme *safeguard* atau tindakan pengamanan perdagangan bertujuan untuk mengamankan produsen dalam negeri dari kerugian yang disebabkan oleh banjirnya impor (Tsukimori & Shimizu, 2017). Pemicu dari pemberlakuan mekanisme *safeguard* adalah apabila volume daging ekspor volume impor daging sapi beku dari seluruh mitra dagang telah melebihi level impor kuartal pertama. Apabila volume ekspor telah melewati batas yang ditentukan, maka mekanisme *safeguard* akan diberlakukan sesuai dengan peraturan dari WTO dan juga ketentuan-ketentuan domestik Jepang dibawah *Japan's Temporary Customs Tariff Measures Act*. AS juga pada tahun 2017 sempat memicu mekanisme *safeguard* ini yang menyebabkan kenaikan tarif bagi ekspor daging sapi AS dari 38,5% menjadi 50% (Kurtenbach, 2017). Keputusan kenaikan tarif ini dilakukan dibawah mekanisme *special safeguard* (SSG) Jepang untuk daging sapi beku yang akan berlaku hingga 31 Maret 2018 atau akhir *Japan Fiscal Year* (JFY) 2017.

Keputusan tersebut akan secara otomatis berlaku pada semua negara yang tidak memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Jepang (Kajimoto, 2017). Termasuk pula AS yang memang tidak memiliki kesepakatan perdagangan bebas dengan Jepang karena perjanjian perdagangan antara kedua negara ini hanya dilakukan dibawah organisasi *World Trade Organization* (WTO). Adanya hambatan non-tarif ini akan menyebabkan kenaikan

tarif pada ekspor daging sapi AS di Jepang. Sehingga hambatan yang disebabkan oleh implementasi *safeguard* tersebut menjadi hambatan besar bagi ekspor daging sapi AS ke Jepang serta akan meningkatkan defisit perdagangan AS dengan Jepang. Respon dari masyarakat AS terutama mereka yang memiliki sangkutan dengan kegiatan ekspor daging sapi AS seperti CEO dari *U.S Meat Export Federation* (USMEF), Philip Seng, mengatakan bahwa tindakan Jepang menaikkan tarif akan mengakibatkan implikasi negatif bagi para produsen daging sapi AS serta akan merugikan rantai restoran Jepang yang mengandalkan daging sapi beku asal AS (Kubota & Mauldin, 2017). Selain itu, *National Cattlemen's Beef Association* yang merupakan asosiasi peternak sapi AS juga mendorong pemerintah AS untuk segera melakukan pembicaraan dengan pemerintah Jepang untuk membahas mengenai permasalahan tarif yang merugikan para peternak daging sapi serta mendorong terbentuknya suatu perjanjian perdagangan bilateral antara AS dan Jepang.

Sehubungan dengan pembahasan mengenai hubungan perdagangan oleh AS ke Jepang secara khusus dalam ekspor daging sapi, tentunya sudah terdapat penelitian-penelitian yang telah membahasnya. Seperti jurnal tulisan oleh Gorman, Mori, dan Lin (1990) yang membahas mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi oleh AS dalam ekspor daging sapi di Jepang pada periode 1990an. Naiknya konsumsi daging sapi di Jepang menyebabkan kenaikan akan permintaan daging sapi. Namun untuk memasuki pasar daging sapi Jepang tidaklah mudah karena Jepang menerapkan sistem kuota terhadap impor daging sapi dari negara lain untuk melindungi penghasil daging sapi domestik. Dalam tulisan ini dijelaskan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh AS untuk menghadapi tantangan ekspor daging sapi di Jepang pada periode 1990an yang pada akhirnya berhasil membentuk perjanjian perdagangan mengenai ekspor daging (Gorman, Mori, & Hwan Lin, 1990).

Selanjutnya, jurnal yang ditulis oleh Becker (2005) mengenai dampak perdagangan ekspor daging sapi AS pasca penutupan akses pasar Jepang dikarenakan oleh penemuan BSE atau penyakit sapi gila di AS pada tahun 2003. Jurnal ini menjelaskan peran pemerintah AS untuk kembali memperbaiki perdagangannya ke Jepang dengan melakukan negosiasi antara kepala pemerintah kedua negara yang menyepakati sebuah kerangka perjanjian dalam rangka melanjutkan kembali perdagangan daging dua arah (Becker, 2005). Dalam tulisan ini dijelaskan AS membentuk *Beef Export Verification* (BEV) yang bertugas untuk membuat program-program pemasaran daging sapi AS serta menilai kualitas dan keamanan daging sapi AS. Selanjutnya, Dalam laporan oleh Obara, Mconell, dan Dyck (2010) memperlihatkan

kondisi ekspor daging sapi AS di Jepang pasca kembali masuknya daging sapi AS ke pasar Jepang pada tahun 2005. Dijelaskan bahwa terlihat adanya peningkatan dalam laporan ekspor daging sapi AS ke Jepang walau secara harga masih lebih mahal dibandingkan sebelum Jepang menutup akses pasarnya. Ekspor yang dilakukan AS juga mengikuti program BEV yang mengharuskan daging sapi yang masuk Jepang berasal dari ternak berumur kurang dari 21 bulan (Obara, McConell, & Dyck, 2010). Dijelaskan pula bagaimana akses pasar daging sapi AS mendapatkan kompetisi dari daging sapi asal Australia. Penelitian ini juga menemukan bahwa di Jepang telah terbentuk pasar bagi produk *offal* sapi atau jeroan yang memberikan keuntungan bagi AS untuk kembali memperluas akses pasarnya di Jepang.

Lebih lanjut dalam tulisan oleh Muhammad, Heerman, Melton, dan Dyck (2016) yang meneliti daya saing daging sapi AS, Australia dan negara lainnya dan bagaimana perbedaan impor antara produk daging sapi (*chilled, beef*, dan *offal*). Ditemukan hasil bahwa terdapat hubungan persaingan yang paling kuat dalam kompetisi ekspor *chilled beef* ke Jepang. Ditunjukkan dengan apabila ada kenaikan harga di satu negara akan menyebabkan peningkatan impor *chilled beef* dari sumber lainnya. Penelitian ini juga menilai potensi dampak akses pasar Jepang terhadap *Japan-Australia Economic Agreement (JAEPA)* yang mulai berlaku pada tahun 2015. Dijelaskan kemungkinan dampak JAEPA adalah konsumen Jepang akan mengganti daging sapi AS dengan produk daging sapi Australia. Serta kerugian terbesar ekspor daging sapi AS berada pada produk *chilled beef*. Diperkirakan hadirnya JAEPA akan mengakibatkan AS kehilangan 36% akses pasarnya di Jepang (Muhammad, Heerman, Melton, & Dyck, 2016). Penelitian mengenai mengestimasi efek implementasi JAEPA terhadap akses pasar daging sapi AS di Jepang juga dilakukan oleh Muhammad, Countryman, Heerman (2017). Tulisan ini menjelaskan bahwa JAEPA akan memberikan keuntungan yang signifikan pada daging sapi Australia. Ditambah pula dengan mundurnya AS dari TPP dimana melalui perjanjian tersebut AS mendapatkan pengurangan tarif terhadap ekspor daging sapi yang dapat meningkatkan akses pasarnya. Namun keputusan AS untuk mundur dinilai dalam penelitian ini akan menyebabkan AS kehilangan peluang sebesar USD 59 juta hingga USD 129 juta pada produk *chilled beef* dan USD 21 juta hingga USD 160 juta pada produk *frozen beef* (Muhammad, Countryman, & Heerman, 2017).

Selanjutnya terdapat pula tulisan yang membahas mengenai mekanisme *safeguard* Jepang berupa peningkatan tarif dan dampaknya terhadap ekspor daging sapi AS. Seperti penelitian oleh Muhammad, Griffith, Martinez, dan Thompson (2020) mengenai bagaimana

tindakan *safeguard* oleh Jepang dapat memberikan pengaruh terhadap nilai ekspor dan daya saing dari daging sapi AS dari negara pesaing lainnya. Dijelaskan dalam penelitian ini bagaimana ekspor bagian otot dan produk *offal* AS memicu implementasi mekanisme *safeguard* oleh Jepang. Penelitian ini memproyeksikan penurunan impor daging sapi AS di Jepang berdasarkan tarif *safeguard* adalah 16,4 USD/bulan. Ketatnya level *safeguard* yang diberikan oleh Jepang juga mengakibatkan daging sapi AS akan sering diberikan sanksi tarif. Dijelaskan pula bahwa hambatan tarif berupa implementasi level *safeguard* juga akan mempengaruhi daya saing daging sapi AS dengan negara lainnya terutama bagi negara-negara yang terlibat dalam perjanjian CP-TPP (Muhammad, Griffith, Martinez, & Thompson, 2020).

Selanjutnya, literatur yang membahas mengenai diplomasi ekonomi oleh AS. Seperti artikel oleh Sawatzki (2019) yang membicarakan mengenai diplomasi ekonomi dalam sektor agrikultural yang dilakukan oleh AS melalui *Foreign Agricultural Service* (FAS). Artikel ini lebih berfokus pada peranan FAS sebagai lembaga pemerintahan dalam implementasi diplomasi ekonomi oleh AS terutama di sektor agrikultural. Dalam implementasi diplomasi ekonomi, FAS berperan untuk menghubungkan sektor agrikultural AS dengan dunia untuk meningkatkan peluang ekspor dan ketahanan pangan global (Sawatzki, 2019).

Melihat karya-karya yang telah dijabarkan diatas dimana tulisan oleh Gorman, Mori, dan Hwan Lin (1990) membahas mengenai tantangan ekspor daging sapi AS pada tahun 1990an sementara penelitian Becker (2005) dan Obara, McConell, dan Dyck (2010) membahas tentang ekspor daging sapi AS pasca kejadian BSE yang menyebabkan Jepang menutup akses pasarnya dari daging sapi asal AS. Selanjutnya pula penelitian yang dilakukan oleh Muhammad, Heerman, Melton, dan Dyck (2016), Muhammad, Countryman, dan Heerman (2017), dan Muhammad, Griffith, Martinez, dan Thompson (2020) membahas mengenai tantangan akses pasar daging sapi AS di Jepang yang diakibatkan oleh persaingan dengan Australia dan mengenai dampak mekanisme *safeguard* oleh Jepang. Serta tulisan mengenai diplomasi ekonomi AS yang dilakukan oleh FAS pada sektor Agrikultural oleh Sawatzki (2019). Peneliti melihat belum ada penelitian yang menuliskan mengenai langkah diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh AS dalam sektor agrikultural terutama mengenai ekspor daging sapi. Oleh karena itu penelitian ini akan memfokuskan pada diplomasi ekonomi AS dalam ekspor daging sapi di Jepang dalam periode 2017-2020.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan pemaparan di atas, daging sapi asal AS mengalami hambatan ekspor berupa tarif dan non-tarif. Hambatan tarif yang dihadapi oleh AS menyebabkan adanya penurunan volume dan nilai ekspor daging sapi AS ke Jepang di tahun 2019. Hambatan ekspor lain yang dihadapi oleh AS adalah hambatan non-tarif dibawah mekanisme *safeguard* WTO. Hal ini karena apabila AS melewati batas volume yang ditetapkan oleh mekanisme *safeguard* tersebut, daging sapi AS akan mengalami kenaikan tarif. Hambatan ekspor yang dihadapi daging sapi AS di Jepang membutuhkan penyelesaian secara cepat. Hal tersebut karena hambatan yang dihadapi AS dapat mempengaruhi kompetisi pasar daging sapi AS di Jepang dan berpengaruh juga pada peningkatan ekspor daging sapi AS di Jepang terutama setelah Jepang melakukan implementasi perjanjian dagang CPTPP. Oleh karena itu, peneliti mengajukan rumusan masalah, yaitu: **BAGAIMANA DIPLOMASI EKONOMI AS TERHADAP JEPANG MENGENAI EKSPOR DAGING SAPI PERIODE 2017-2020?**

## **1.3. TUJUAN PENELITIAN**

Melihat dari pokok permasalahan yang hendak diangkat, penelitian ini bertujuan untuk:

### **1.3.1. Tujuan Praktis**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh AS terhadap Jepang untuk menyelesaikan hambatan tarif terhadap ekspor daging sapi AS pada periode 2017-2020.

### **1.3.2. Tujuan Teoritis**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pembahasan dalam studi Hubungan Internasional, terutama mengenai penggunaan instrumen diplomasi ekonomi dalam upaya menegosiasikan dan menyelesaikan hambatan tarif dalam perdagangan internasional.

## **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis serta akademis, sebagai berikut:

**1.4.1 Manfaat Praktis**, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan informasi kepada para pembuat kebijakan baik di pemerintah AS maupun negara lainnya mengenai langkah dan alasan

diplomasi ekonomi yang digunakan oleh AS dalam menyelesaikan hambatan ekspor daging sapi di Jepang

**1.4.2. Manfaat Akademis,** hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi seperti memberikan wawasan dalam ilmu hubungan internasional terutama dalam hal diplomasi ekonomi di bidang agrikultural bagi para penstudi hubungan internasional.

## **1.5 SISTEMATIKA PENULISAN**

**BAB I PENDAHULUAN:** Bab ini berisikan penjelasan penulis mengenai latar belakang masalah, studi literatur, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dalam penelitian.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA:** Bab ini berisikan penjelasan penulis mengenai teori, dan konsep yang akan digunakan sebagai landasan dan acuan dalam penulisan penelitian dan kerangka berpikir.

**BAB III METODE PENELITIAN:** Bab ini berisikan penjelasan penulis mengenai metodologi yang akan digunakan di dalam penelitian. Metodologi penelitian ini meliputi objek penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, dan table rencana waktu.

**BAB IV DINAMIKA EKSPOR DAGING SAPI AS DI JEPANG:** Bab ini berisikan penjabaran dan temuan penulis mengenai potensi ekspor daging sapi di Jepang, kondisi ekspor daging sapi AS di Jepang, dan kebijakan impor daging sapi di Jepang

**BAB V UPAYA AMERIKA SERIKAT MENINGKATKAN EKSPOR DAGING SAPI DI JEPANG MELALUI DIPLOMASI EKONOMI:** Bab ini berisikan penjabaran dan temuan penulis mengenai langkah-langkah diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh AS untuk menyelesaikan hambatan ekspor daging sapi dan meningkatkan ekspor daging sapi di Jepang.

**BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN:** Bab ini berisikan rangkuman mengenai hasil dan temuan penulis selama melakukan penelitian serta saran dan rekomendasi penulis untuk penelitian kedepannya.